

ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PINRANG

Syarifuddin HS

Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar

Abstrak : Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan penanganan secara serius agar masyarakat terlepas dari kemiskinan. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan partisipasi dari masyarakat karena dengan keikutsertaan masyarakat dapat tercipta kondisi-kondisi kemajuan ekonomi. Kemiskinan yang merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang memerlukan penanganan secara serius, berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu sebab masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang serta Hal-hal apa yang menjadi hambatan dan menunjang dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa usaha yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang antara lain melalui bantuan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin di kabupaten pinrang dalam bentuk sarana dan prasarana yang diberikan perkelompok pada setiap kecamatan. Hal-hal yang menjadi hambatan dan menunjang dalam pengentasan kemiskinan tersebut antara lain adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program usaha pengentasan kemiskinan Kabupaten Pinrang adalah: (1) Tingkat pendidikan masyarakat fakir miskin Kabupaten Pinrang yang sebagian besar masih rendah (2) Terbatasnya dana yang disiapkan oleh pemerintah (3) Adanya beberapa kelompok binaan sosial fakir miskin yang sangat jauh dan terpencil (4) Kemudian hari segi administrasi khususnya menyangkut laporan Keluarga Binaan Sosial yang sangat jarang dilaporkan oleh ketua kelompoknya

Kata Kunci : Pengentasan kemiskinan – Dinas Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengalami gelombang pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan yang terus menerus, sementara untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat mengalami kemerosotan yang menyebabkan penderitaan rakyat banyak. Dalam waktu cukup lama bangsa Indonesia dirundung penderitaan sehingga untuk menyusun ekonomi yang baik dan dapat berjalan dengan baik. Namun pada tahun 1969 pemerintah menentukan Pola Umum Jangka Panjang dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun atau terbentuknya Repelita.

Pembangunan sejak Pelita I sampai dengan saat ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat dimana masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa pembangunan dilaksanakan untuk dinikmati atau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan penanganan secara serius agar masyarakat terlepas dari kemiskinan. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan partisipasi dari masyarakat karena dengan keikutsertaan masyarakat dapat tercipta kondisi-kondisi kemajuan ekonomi.

Pembangunan sebagai proses yang dinamis yang mengandung kehendak untuk merubah cara kehidupan, cara berfikir, cara menghadapi persoalan, suasana yang dinamis terdapat unsur-unsur kesadaran dan hasrat untuk merubah kehendak cara hidup lama kehidup yang baru. Program pembinaan kesejahteraan sosial pada masyarakat miskin adalah merupakan salah satu program dari dari program kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang program pengentasan kemiskinan. Penanganan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, disamping menempatkan sasaran garapan sebagai objek sekaligus diarahkan agar mereka kelak menjadi subjek yang mau dan mampu penyandang masalah kemiskinan sosial lainnya.

Kemiskinan yang merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang memerlukan penanganan secara serius, berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu sebab masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan sangat dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak namun yang bertanggung jawab penuh dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan menangani berbagai masalah sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang. Usaha-usaha pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang dapat mengurangi populasi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para penyandang masalah kemiskinan di Kabupaten Pinrang.

Landasan Teori

Pengertian Kemiskinan

Untuk lebih jelas terlebih dahulu kita akan melihat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kemiskinan. "Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut". (1981 : 25). Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesatnya dan timbul nilai-nilai yang baru. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu untuk menyatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila terdapat perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat baik itu di desa maupun di kota-kota besar lebih jelasnya nampak perbedaannya. Untuk itu penulis mengutip hasil konfrensi Tripartite World Confrience, di Jakarta mengemukakan : "Kemiskinan yang kualitatif adalah tidak dapat

dipenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan dasar (Basic Needs) pada suatu golongan masyarakat. Kebutuhan dasar itu adalah makanan, perumahan, pakaian, perlengkapan rumah secukupnya (sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing), fasilitas air minum, pembuangan limbah, transportasi umum dan pendidikan". (1975 : 15).

Kemudian Bagong Suyanto dalam Bukunya Sedangkan kemiskinan problem dan strategi pengentasan kemiskinan, mengartikan kemiskinan sebagai berikut :

"kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah, adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat". (1979 : 6).

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas maka dapat diartikan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.

Hal ini diperjelas lagi oleh Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI mengemukakan bahwa : "Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi dirinya, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi diri dan keluarga atau kelompoknya". (1996 : 1)

Tinjauan Kemiskinan dan Masalahnya

Jika kita berbicara mengenai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, (golongan masyarakat miskin) maka menurut Prof. Suyagio, golongan masyarakat miskin itu dapat dikelompokkan pada tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

- Golongan Miskin
- Golongan Miskin Sekali
- Golongan Paling Miskin

Yang masing-masing mempunyai kriteria menurut jumlah pendapat yang diukur dengan nilai sejumlah besar tertentu. Nampaknya pengertian kelompok dibawah garis kemiskinan tersebut cenderung dapat diidentikkan dengan fakir miskin. Jika kelompok tersebut diasumsikan identik dengan fakir miskin maka kelompok dibawah garis kemiskinan ini menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1991 tentang pelayanan kesejahteraan fakir miskin, mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi manusia.
- b. Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Kalau kita selami kedua aspek pengertian tersebut nampaknya pengertian yang pertama cenderung mengarah pada kondisi kemiskinan yang lebih parah dan pada pengertian yang

kedua. Orang awam sering menyebutkan golongan ini sebagai golongan fakir, karena kelompok ini mempunyai pekerjaan tetap selain memintaminta, yang menyebabkan kondisinya parah.

- Disatu pihak mereka akan mencari jalan apa saja, tanpa menghiraukan apakah itu sesuai dengan norma-norma masyarakat atau tidak.
- Dipihak lain mereka akan pasrah kepada nasib, sambil menunggu belas kasihan orang lain.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa golongan fakir miskin ini cenderung tidak lagi menghiraukan dirinya maupun martabat kemanusiaannya.

Kecenderungan seperti ini, boleh jadi disebabkan karena mereka tidak tahu dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui yang sesungguhnya, disebabkan karena kemampuan materil, mental spiritual dan sosial mengalami hambatan sehingga sangat terbatas. Keterbatasan kemampuan ini pula yang menyebabkan mereka tidak bisa atau tidak mampu mengetahui jalan keluar dari masalah mencari pemenuhan kebutuhan pokoknya dengan cara yang layak. Dapat diduga,bahwa untuk keperluan mereka bisa bertindak menurut pendapatnya sendiri. Dari segi mereka, pemenuhan kebutuhan pokok menurut cara mereka adalah wajar. Tetapi sering kali tindakan itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Karena keterbatasan kemampuan berkomunikasi secara sosial, mereka sulit untuk memenuhi bahwa cara-cara yang mereka gunakan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Golongan fakir miskin yang kedua agak sedikit berlainan dengan golongan fakir miskin yang pertama.Golongan ini disebut kelompok miskin.

Adanya pekerjaan tetap yang mereka punyai, menunjukkan pada dasarnya masalah utama mereka telah ketahui, demikian juga jalan keluar masalah yang dialami sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.Namun penghasilan yang mereka peroleh sangat kecil, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Kondisi ini menunjukkan pada situasi yang rawan.Berarti bahwa ketidaktepatan dan kelambatan dalam penanganan mereka dapat menghilangkan rasa harga diri yang sudah ada, dan mereka dapat jatuh pada kelompok fakir miskin yang lebih parah.

Untuk ini penulis akan menguraikan tentang kategori keluarga fakir miskin dan kategorinya sesuai yang sesuai yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial RI adalah :

- Yang termasuk kategori fakir miskin adalah :
 1. Buruh tani yang berpenghasilan rendah
 2. Petani yang berpenghasilan rendah
 3. Buruh nelayan yang berpenghasilan rendah
 4. Nelayan yang berpenghasilan rendah

5. Buruh kasar yang berpenghasilan rendah
6. Pedagang kecil yang berpenghasilan rendah
- Kriteria keluarga fakir miskin adalah sebagai berikut :
 1. Keterbatasan pemenuhan pangan.
 2. Keterbatasan pemenuhan sandang.
 3. Keterbatasan pemenuhan papan.
 4. Keterbatasan pemenuhan pelayanan kesehatan.
 5. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
 6. Keterbatasan hubungan sosial (interaksi sosial).
 7. Keterbatasan penghasilan.
 8. Keterbatasan pengeluaran.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Menurut pendapat Prof. Dr. Suyagio tahun 1981 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- Aspek badaniah atau mental
- Bencana alam
- Rendah pendapatan
- Pola hidup yang konsumtif
- Kepadatan penduduk
- Tanah gersang
- Urbanisasi

Untuk mengetahui apakah individu atau keluarga tersebut dibawah garis kemiskinan, yang penulis kutip dari Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial tahun 1996 bahwa ciri-ciri masyarakat fakir miskin adalah sebagai berikut :

- Pengangguran atau setengah pengangguran.
- Berusaha sendiri dalam lingkungan yang terbatas.
- Tidak mempunyai modal atau alat kerja sendiri.
- Tidak berpendidikan.
- Kurang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dan mengarah lebih dari satu anggota keluarga untuk bekerja.

Tujuan Pengentasan Kemiskinan

Adapun tujuan dari pengentasan kemiskinan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Tujuan umum

Tujuan pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin adalah untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan serta meningkatkan harkat dan martabat sosialnya, agar fakir

miskin lebih menyadari akan masalahnya ditandai dengan tumbuhnya harga diri, dan meningkatkan kemampuan diri sehingga mampu menyelesaikan masalah mereka secara sendiri.

Berdasarkan garis kebijakan yang ditetapkan Menteri Sosial dan penjabarannya berupa kebijakan teknis dan arahan program yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial seperti di atas, maka pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin diarahkan kepada upaya menumbuhkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan diri dalam memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk itu pelaksanaan program tersebut ditinjau dari segi penganggaran yaitu melalui anggaran pembangunan yang disebut Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial melalui Anggaran Rutin Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial disebut pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin, cacat tuna ganda dan jompo terlantar.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2001, maka prinsip yang dianut adalah :

1. Pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin melalui perubahan sikap mental dan penciptaan kondisi yang tanggap terhadap masalah kemiskinan, termasuk upaya-upaya mengurangi kendala-kendala sosial didalam pengentasan kemiskinan.
2. Pengembangan kemauan dan kemampuan bagi fakir miskin untuk memperbaiki taraf kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Bimbingan dan bantuan fakir miskin diprioritaskan pada desa/kelurahan miskin terpencil dan dikantong-kantong kemiskinan.
4. Peningkatan efektivitas penanggulangan fakir miskin dilaksanakan melalui pemantapan pola keterpaduan serta profesionalisme penanganan.
5. Memperluas jangkauan pelayanan dengan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat.

2. Tujuan khusus

- Keluarga fakir miskin (keluarga binaan sosial) memiliki kemampuan untuk berusaha dan kemampuan untuk berkomunikasi sosial.
- Keluarga Binaan Sosial (KBS) memiliki kemampuan meningkatkan penghasilan yang baik.
- Kondisi rumah dan lingkungan KBS yang lebih baik.
- Tumbuh dan meningkatnya produktivitas usaha KBS yang mengarah pada terbentuknya embrio jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan telah membuat beberapa garis kebijakan :

1. Kebijakan peningkatan sumber daya manusia.
2. Kebijakan perluasan kesempatan kerja yang wajar terutama di daerah pedesaan melalui gerakan peningkatan ekspor dan produksi.
3. Pelaksanaan pelayanan dan kesejahteraan sosial ditingkatkan secara lebih terpadu.
4. Kebijakan pendayagunaan karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang.
5. Mendorong dan meningkatkan partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial khususnya program kesejahteraan sosial.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis laksanakan penulis menggunakan tipe yaitu Tipe penelitian deskriptif yaitu tipe yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi sosial dan ekonomi pada waktu penelitian dilakukan..Adapun dasar penelitian yang dilakukan digunakan adalah survey, yaitu untuk mendapatkan data terhadap data yang diteliti Adapun pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : Penelitian kepustakaan (Library Research),Penelitian Lapangan (Field Research),Penelitian lapangan adalah teknik yang digunakan penulis dengan langsung pada lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Teknik interview, yaitu teknik yang digunakan dimana penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak pegawai yang menangani masalah tersebut.
- b. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dan keterangan tentang program pengentasan kemiskinan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- c. Angket yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data-data melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan.

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui usaha-usaha pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang lokasi dan waktu pelaksanaan serta jenis-jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok binaan sosial fakir miskin.

Sesuai data yang ada pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang, bahwa jumlah penduduk masyarakat miskin di kabupaten Pinrang pada tahun 2015/2016 adalah 3.328 KK atau 0,79 % dari jumlah KK. Namun pada anggaran 2016/2017

dialokasikan proyek bantuan kesejahteraan sosial melalui dana APBN yang ditempatkan di kecamatan Pinrang Baru dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

Alokasi Proyek BKS Di Kecamatan Pinrang Baru Kabupaten Pinrang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah KK	Keterangan
1.	Pa'bentengan	3 Kelompok	30 KK	Setiap 1 (satu)
2.	Nisombalia	3 Kelompok	30 KK	kelompok
3.	Soreang	3 Kelompok	30 KK	ada 10 KK
Jumlah Total		9 Kelompok	90 KK	

Sumber data : Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang,

Adapun jenis bantuan yang diberikan setiap kelompok adalah sebagai berikut:

- buah perahu jollorok.
- 1 buah mesin merk Ratna.
- 1 set pukat (peralatan penangkapan ikan).
- 10 drum bahan bakar.
- 500 kg beras.

Jadi jumlah masyarakat fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan atau yang belum ditangani masih ada 3.238 KK.

Untuk tahun 2017-2018 proyek bantuan kesejahteraan sosial yang dialokasikan di kabupaten Pinrang dan ditempatkan di kecamatan Pinrang Utara untuk tahun anggaran 2017-2018 melalui dana APBN dapat diperinci seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Alokasi Proyek BKS Tahun Anggaran
Di Kecamatan Pinrang Utara Kabupaten Pinrang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah KK	Keterangan
1.	Marannu	3 Kelompok	30 KK	Setiap I (satu)
2.	Salerang	3 Kelompok	30 KK	kelompok ada
3.	Bontolempangan	3 Kelompok	30 KK	10 KK
Jumlah Total		9 Kelompok	90 KK	

Sumber data : Kantor Dings Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang

Setiap kelompok diberikan bantuan berupa usaha ekonomis produksi dengan jenis bantuan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi yaitu :

- 5 ekor bibit sapi jantan
- 1 buah kandang
- 10 botol obat-obatan.
- 500 kg beras.

Dengan diberikannya bantuan BKS di kecamatan Pinrang Utara sebanyak 90 KK berarti jumlah masyarakat fakir miskin yang belum terlayani oleh Dinas Kesejahteraan Sosial adalah 3,148 KK.

Namun pada tahun anggaran 2017-2018 proyek Bantuan Dinas Kesejahteraan Sosial yang dialokasikan di kabupaten Pinrang mengalami peningkatan sehingga kegiatan BKS ditempatkan pada 3 kecamatan melalui dana APBN.

Adapun proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) dapat diperinci seperti pada tabel berikut :

Tabel 3
Alokasi Proyek BKS Tahun Anggaran 2017/2018
Di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok	Jumlah KK	Ket.
1.	Ramba	- lebbotengae	4 Kelompok	40 KK	Setiap kelompok terdapat 10 KK
		- Laiya	4 Kelompok	40 KK	
		- Limangpeccoe	4 Kelompok	40 KK	
2.	Bantimurung	-Mangeloreng	4 Kelompok	40 KK	
		- Mattoanging	4 Kelompok	40 KK	
		- Leang-leang	4 Kelompok	40 KK	
		- Pattontongan	4 Kelompok	40 KK	
3.	Mandai	- Moncong Loe	4 Kelompok	40 KK	
		- Moncong Lappas	4 Kelompok	40 KK	
Jumlah Total			36 Kelompok	366KK	

Sumber data : Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang

Untuk setiap kelompok diberikan bantuan berupa paket usaha ekonomis produktif berupa :

- a. 5 ekor bibit sapi jantan.
- b. 1 buah kandang.
- c. 10 botol obat-obatan.
- d. 500 kg beras.

Jumlah keseluruhan masyarakat fakir miskin yang telah dibantu melalui proyek bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dari tahun anggaran 2015-2016 sampai dengan tahun anggaran 2017-2018 dengan menggunakan dana APBN di kabupaten Pinrang adalah :

- a. 5 kecamatan.
- b. 15 desa dan kelurahan.
- c. 54 kelompok.
- d. 540 KK.

Dengan dibantunya 540 KK berarti jumlah fakir miskin di kabupaten Pinrang pada tahun 2015 masih 2788 KK. Dengan demikian masyarakat fakir miskin yang akan diusulkan untuk dibantu pada tahun anggaran 2015 adalah 3 kecamatan melalui dana APED kabupaten Pinrang.

Jadi apabila ditinjau darisegi jumlah jenis bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok Keluarga Binaan Sosial (KBS) fakir miskin yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok pada kabupaten Pinrang maka dapat digambarkan kesesuaiannya seperti pada tabel berikut ini. Miskin yang akan diusulkan untuk dibantu pada tahun anggaran 2001 adalah 3 kecamatan melalui dana APED kabupaten Pinrang.

Jadi apabila ditinjau dari segi jumlah jenis bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok Keluarga Binaan Sosial (KBS) fakir miskin yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok pada kabupaten Pinrang maka dapat digambarkan kesesuaiannya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Jumlah dan Jenis Bantuan Di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015-2016 S/D 2017/2018

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase
1.	Sangat Sesuai	30	75 %
2.	Sesuai	8	20 %
3.	Kurang Sesuai	2	05 %
4.	Tidak Sesuai	-	00 %
Jumlah		40	100 %

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner,

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jawaban responden yang menilai sangat sesuai sebanyak 30 responden, dengan presentase 75 % sedangkan yang menilai sesuai sebanyak 8 responden dengan presentase 20 % serta yang menilai bahwa jenis bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan pada anggota KBS kurang sesuai sebanyak 2 responden atau 05 % sedangkan yang menilai tidak sesuai tidak ada responden atau 00 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bantuan yang telah diberikan kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) baik itu jumlah maupun jenis bantuan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kelompok.

1. Pengaruh Bantuan Terhadap Keluarga Binaan Sosial (KBS)

Perlu dipahami bahwa pengertian bantuan tersebut diatas dalam rangka pengembangan usaha tidak diartikan sebagai bantuan materil saja tapi juga bantuan yang bersifat mental, spiritual maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yang mengatakan bahwa usaha-usaha penuntasan kemiskinan sudah dirasakan manfaatnya, bahkan sudah sebagian anggota Kelompok Binaan Sosial yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) secara layak atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok pada anggota binaan sosial maka akan tercipta pula dinamika sosial atau interaksi sosial yang lebih mantap baik terhadap keluarga maupun lingkungannya serta masyarakat sekitarnya.

Tabel 5

Penilaian Responden Tantang Manfaat Bantuan Kesejahteraan Sosial Terhadap Kelompok Binaan Sosial Kabupaten Pinrang

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase
1.	Sangat Bermanfaat	36	90 %
2.	Bermanfaat	4	10%
3.	Kurang Bermanfaat	0	00 %
4.	Tidak Bermanfaat	0	00 %
Jumlah		40	100 %

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner,

Sesuai dengan hasil penilaian responden tentang manfaat Bantuan Kesejahteraan Sosial maka dapat dilihat sesuai dengan tabel 09 di atas bahwa yang menilai sangat bermanfaat ada 36 orang dengan tingkat persentase 90 % sedangkan yang menilai bermanfaat ada 4 orang atau 10 % sedangkan yang menilai kurang bermanfaat tidak ada responden atau 00 % demikian pula yang menilai tidak bermanfaat juga tidak ada responden atau 00 %. Jadi dengan demikian bahwa bantuan yang diberikan pada anggota kelompok keluarga di Binaan Sosial dirasakan sangat besar manfaatnya dalam menumbuhkembangkan potensi yang ada.

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang, dan menjelaskan bahwa dalam usaha pengentasan kemiskinan ada beberapa tahapan yang harus atau mutlak dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Tahap I

Pembentukan calon Keluarga Binaan Sosial meliputi :

- 1) Orientasi dan Observasi
- 2) Seleksi
- 3) Penyuluhan Sosial
- 4) Bimbingan Pengenalan Masalah
- 5) Bimbingan Motivasi
- 6) Evaluasi

Tabel 6
Penilaian Responden Tentang Pelaksanaan Pembentukan
Calon Keluarga Binaan Sosial

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase
1.	Sangat Perlu	15	37 %
2.	Perlu	10	25 %
3.	Kurang Perlu	13	33 %
4.	Tidak Perlu	2	05 %
Jumlah		40	100 %

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner,

Pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat penilaian responden tentang pelaksanaan pembentukan calon keluarga binaan sosial, dimana responder yang menilai sangat perlu sebanyak 15 responden dengan persentase 37 % sedangkan yang menilai perlu sebanyak 10 responden dengan persentase 25 % dan menilai kurang perlu sebanyak 13 responden dengan persentase 33 % serta yang menilai tidak perlu sebanyak 2 responden atau 05 % dengan demikian bahwa pelaksanaan pembentukan calon keluarga binaan sosial sangat perlu dilaksanakan dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan.

b. Tahap II

Pembentukan Usaha Keluarga dan usaha kelompok, meliputi :

1. Latihan Keterampilan Pemantapan Usaha Ekonomi Produktif
2. Bimbingan Pelaksanaan
3. Bantuan Stimulan

Tabel 7
Penilaian Responden Tentang Pembentukan Usaha Keluarga dan
Usaha Kelompok Binaan Sosial

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase
1.	Sangat Perlu	29	73 %
2.	Perlu	10	25 %
3.	Kurang Perlu	1	02 %
4.	Tidak Perlu	-	00 %
Jumlah		40	100 %

Sumber data : Hasil Pengolahan Kuesioner

Pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat jawaban responden tentang pelaksanaan pembentukan calon keluarga binaan sosial, dimana responden yang menilai sangat perlu sebanyak 29 responden dengan persentase 73 % sedangkan yang menilai perlu sebanyak 10 responden dengan persentase 25 % dan menilai kurang perlu hanya 1 responden dengan persentase 02 % serta yang menilai tidak perlu tidak ada responden atau 00 % dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembentukan usaha keluarga dan usaha kelompok binaan sosial sangat dibutuhkan dalam usaha

pengentasan keluarga fakir miskin di kabupaten Pinrang.

c. Tahap III

Pembentukan Usaha Koperasi Dan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, meliputi :

1. Bimbingan Keda Kelompok
2. Pembinaan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan
3. Evaluasi

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Pembentukan Usaha Koperasi
Dan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

No.	Jawaban responden	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat perlu	15	37
2.	Perlu	14	35
3.	Kurang perlu	11	28
4.	Tidak perlu	-	00
Jumlah		40	100 %

Sumber data : Hasil pengolahan data Kuesioner

Apabila diperhatikan tabel di atas maka dilihat bahwa penilaian responden yang menjawab sangat perlu adalah 15 responder dengan tingkat presentase 37 % dan menjawab perlu ada 14 % responden atau 35 % serta yang menilai kurang perlu terdapat 11 responden dengan presentase 28 % sedangkan yang menilai tidak perlu tidak ada responden atau 00 %.

d. Tahap IV

Pembentukan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1. Pemantapan dan Penyegaran
2. Pembinaan Pelaksanaan
3. Bimbingan Usaha
4. Bantuan Sarana
5. Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif
6. Evaluasi

Tabel 9
Tanggapan responden tentang pembentukan jaminan kesejahteraan
Sosial terhadap Pendidikan keluarga binaan sosial Kabupaten Pinrang

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase
1.	Sangat perlu	32	80
2.	Perlu	8	20
3.	Kurang perlu	-	00
4.	Tidak perlu	-	00
Jumlah		40	100%

Sumber data Hasil pengolahan data Kuesioner

Sesuai dengan penilaian responden di atas tabel maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan jaminan Kesejahteraan Sosial terhadap Keluarga binaan sosial masih sangat perlu dilakukan sesuai dengan penilaian responden sebanyak 32 responden atau tingkat presentase 80 % dan yang masih menilai perlu ada 8 responden atau 20 % serta yang menilai kurang perlu tidak ada responden 00 %.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang, maka dapat diuraikan sesuai dengan data yang diperoleh penulis di lapangan atau dari respon dan sewaktu penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- a. Berkat adanya kerjasama dan kerja yang keras serta adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan baik dari dinas kesejahteraan sosial maupun pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa dan Kecamatan.
- b. Peran serta masyarakat sendiri melalui para pimpinan formal, kaum cendekiawan, wartawan serta tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Dari beberapa keberhasilan tersebut di atas maka sangat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

- a. Adanya kemauan masyarakat fakir miskin untuk merubah pola pikir dalam pemenuhan kebutuhan sesuai norma-norma yang berlaku untuk dapat meningkatkan harkat martabat kemanusiaan.
- b. Aktifnya para petugas seksi teknis turun langsung ke lapangan untuk mengadakan motivasi dan bimbingan tentang masalah kemiskinan.
- c. Adanya kordinasi dari dinas terkait seperti dinas-dinas pertanian Kabupaten Pinrang, dinas koperindag, serta dinas lainnya yang berkompeten dalam masalah peningkatan kesejahteraan fakir miskin dengan terbentuknya kelompok usaha Keluarga Binaan Sosial dapat memudahkan petugas untuk memberikan informasi yang ada kaitannya dengan usaha pengentasan kemiskinan.

2. Faktor Penghambat

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang dan pembinaan usaha kelompok binaan sosial yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program usaha pengentasan kemiskinan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat fakir miskin Kabupaten Pinrang yang sebagian

besar masih rendah atau dengan kata lain buta huruf sehingga tidak begitu mudah menerima ide-ide baru yang mungkin bermanfaat bagi dirinya.

- b. Terbatasnya dana yang disiapkan oleh pemerintah khususnya dalam pembinaan masyarakat fakir miskin sehingga dapat menyebabkan kualitas yang diinginkan oleh anggota kelompok binaan sosial tidak sesuai.
- c. Adanya beberapa kelompok binaan sosial fakir miskin yang sangat jauh dan terpencil sehingga tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat maupun roda dua sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak dalam rangka usaha penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan yang rutin.
- d. Kemudian hari segi administrasi khususnya menyangkut laporan Keluarga Binaan Sosial yang sangat jarang dilaporkan oleh ketua kelompoknya atau pembina usaha sehingga masalah yang ada dalam kelompok tidak bisa terselesaikan secara tepat dan cepat.

Kesimpulan

Beberapa usaha yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pinrang antara lain melalui bantuan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin di kabupaten pinrang dalam bentuk sarana dan prasarana yang diberikan berkelompok pada setiap kecamatan.

Hal-hal yang menjadi hambatan dan menunjang dalam pengentasan kemiskinan tersebut antara lain adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program usaha pengentasan kemiskinan Kabupaten Pinrang adalah: (1) Tingkat pendidikan masyarakat fakir miskin Kabupaten Pinrang yang sebagian besar masih rendah atau dengan kata lain buta huruf sehingga tidak begitu mudah menerima ide-ide baru yang mungkin bermanfaat bagi dirinya.(2) Terbatasnya dana yang disiapkan oleh pemerintah khususnya dalam pembinaan masyarakat fakir miskin sehingga dapat menyebabkan kualitas yang diinginkan oleh anggota kelompok binaan sosial tidak sesuai. (3) Adanya beberapa kelompok binaan sosial fakir miskin yang sangat jauh dan terpencil sehingga tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat maupun roda dua sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak dalam rangka usaha penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan yang rutin.(4) Kemudian hari segi administrasi khususnya menyangkut laporan Keluarga Binaan Sosial yang sangat jarang dilaporkan oleh ketua kelompoknya atau pembina usaha sehingga masalah yang ada dalam kelompok tidak bisa terselesaikan secara tepat dan cepat.

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto, 1994. *Perlengkapan Kamiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*.AirlanggaUniversiti Press.
- Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1996.*Petunjuk Peningkatan Kesejahteraan Fakir*

Miskin.

-, 1997. Petunjuk Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin. Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial DLPSOS RI 1977.
- Kartini Kartono, Dr, 1992. Patologi Sosial Jilid I. PN.Rajawali Press Jakarta.
- Moerir, AS, 1987. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan.Penerbit : Jakarta Gunung Agung.
- Nainggola, H, 1983. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Jakarta, Cetakan Ke Empat.
- NurdinFadhil, M, Drs, 1990. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial.PN. Angkasa Bandung. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha.
- Poerwadarminto, W.J.S, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
-, TripartieWoldConfrence, 1975. On Distribution, Social Progress and The International Devision Of Labour :Genesa August 75 Confidential Report.
- SoekantoSoejono, 1996. Sosiologi Suatu Pengantar. PN. CV. Rajawali Jakarta.
- SH, Simanjuntak, B, Drs. 1981. Beberapa Aspek Patologi Sosial.PN.Alumni Bandung.
- Siagian, SP, Dr, Prof. Pengetahuan Perkantoran. Jakarta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara, 1981.
- Sumarnonugroho, T, 1982. Sistem Intervensi Sosial.PN.Hanindita, PT, Yogyakarta
- Siagian,SP, Dr, Prof, 1987. Pengembangan Sumber Daya Insan Jakarta Balai Pustaka.
- The Liang Gie. Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta, Penerbit : Karya Indonesia 1977.